



BULETIN

PARLEMENTARIA

NOMOR: 808/III/2014

IV/MARET 2014



Freeport Harus Bangun Smelter di Papua



KEGIATAN DPR-RI MINGGU KEEMPAT MARET 2014

Laporan kegiatan DPR-RI pada minggu keempat Maret 2014 terdiri dari kunjungan kerja Komisi-komisi pada masa reses persidangan III tahun sidang 2013-2014, pertemuan antar Ketua-ketua lembaga di gedung MPR RI, 20 Maret, Sosialisasi UU oleh Ketua DPR RI pada 17 dan 18 Maret dan Audiensi Sekjen KPAI dengan Ketua DPR RI. Adapun rincian laporan, sebagai berikut:

Kunjungan Kerja Komisi-komisi pada Masa Reses Tahun Sidang 2013-2014

Semua Komisi DPR RI melakukan Kunker ke Provinsi-provinsi, yaitu; (1) Komisi I ke Sumatera Utara, Kalimantan Utara dan Jawa Timur, (2) Komisi II ke Sumatera Selatan, Jawa Barat dan Jawa Timur, (3) Komisi III ke Sumatera Selatan, Jawa Barat dan Sulawesi Tengah, (4) Komisi IV ke Bengkulu, DIY dan Bali, (5) Komisi V ke Papua, Sulawesi Utara dan Nusa Tenggara Timur, (6) Komisi VI tidak melaksanakan kunjungan kerja, (7) Komisi VII tidak melaksanakan kunker, (8) Komisi VIII ke Jambi, Kalimantan Barat dan Maluku, (9) Komisi IX ke DIY dan Bali, (10) Komisi X ke NAD, Kalimantan Tengah dan Nusa Tenggara Barat, (11) Komisi XI ke Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan dan NTB. Berdasarkan tabulasi daerah-daerah yang akan dikunjungi, maka ada daerah-daerah yang dikunjungi oleh dua komisi atau lebih, yaitu; (1) Provinsi Sumatera Selatan oleh Komisi II dan III, (2) Provinsi Jawa Barat dikunjungi oleh Komisi II dan III, (3) Provinsi DIY dikunjungi oleh Komisi IV dan IX, (4) Provinsi Jawa Timur dikunjungi oleh Komisi II dan V, (5) Provinsi Bali dikunjungi oleh Komisi IV dan IX.

Oleh: Ketua DPR-RI, DR.H. Marzuki Alie



Pileg yang akan berlangsung pada tanggal 9 April 2014, dilaksanakan atas dasar UU No.8 tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. Dan UU No.15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

Untuk Pilpres, dasarnya adalah UU No.42 tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta No.15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Pileg dan Pilpres menjadi momentum yang sangat penting, untuk pembangunan demokrasi dan perwujudan kesejahteraan rakyat. Demokrasi yang dibangun harus bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, dari rakyat, untuk rakyat, dari semua untuk semua. Dua pemilu yang akan dilakukan pada 2014, dilaksanakan dengan harapan untuk melahirkan demokrasi yang lebih berkualitas dari Pemilu-pemilu sebelumnya sesuai pasal 22 E UUD NRI, dilaksanakan secara langsung, umum,

bebas, rahasia, jujur dan adil. Dalam Pemilu, rakyat diberi ruang untuk menentukan wakil-wakil rakyat dan menentukan Pemimpin Nasional. Dalam Pilpres dan Pileg, netralitas PNS, TNI dan Polri adalah suatu keniscayaan.

Sosialisasi UU oleh Ketua DPR

Sejumlah sosialisasi dilakukan oleh Ketua DPR RI; (1) UU No.1 tahun 2014 tentang Perubahan atas Perubahan atas UU No.27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Point-point yang disampaikan dalam forum sosialisasi pada masyarakat, bahwa UU ini melaksanakan pasal 33 UUD NRI tahun 1945 sesuai dengan putusan MK No.3/PUU-VIII/2010, yang menyangkut dua hal mendasar yaitu; (1) Kekuasaan Negara atas pengelolaan sumber daya alam termasuk wilayah pesisir dan pulau-pu-

Pertemuan Ketua-ketua Lembaga dengan Tuan Rumah MPR RI

Pertemuan tersebut dilakukan pada tanggal 20 Maret 2014 di gedung MPR RI. Pertemuan ini adalah pertemuan reguler yang ke-10 dalam periode 2009-2014. Agenda pertemuan membahas tentang pemilu legislatif dan pemilu Presiden/Wapres. Dalam pertemuan, telah didiskusikan oleh Ketua-ketua Lembaga mengenai persiapan dan pelaksanaan untuk dua Pemilu, yaitu Pileg dan Pilpres. Untuk

lau kecil dan (2) akan tertutupnya akses masyarakat pesisir dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dan potensi hilangnya hak-hak dan terusirnya masyarakat pesisir serta kearifan-kearifan lokal dengan pemberian HP-3, diakibatkan akan munculnya dominasi swasta sebagai pemilik modal besar.

(2) Sosialisasi Perkembangan pembahasan RUU tentang Perubahan atas UU No.18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Salah satu *point* utama yang dikaji ulang dalam revisi ini adalah impor produk hewan berbasis negara (*country based*). Ketentuan *country based* termaktub dalam pasal 59 ayat (1) dan (2). Pada ayat (1) disebutkan, setiap orang yang akan memasukkan produk hewan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib memperoleh izin pemasukan dari menteri yang terkait dibidang perdagangan setelah memperoleh rekomendasi dari; (a) untuk produk hewan segar dari Menteri; atau (b) untuk produk hewan dari pimpinan instansi yang bertanggung jawab dibidang pengawasan obat dan makanan dan/atau menteri.

Pada ayat 2, disebutkan bahwa produk hewan segar yang dimasukkan ke dalam wilayah NKRI sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a harus berasal dari unit usaha produk hewan pada suatu negara atau zona dalam suatu negara yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukan produk hewan.

(3) Sosialisasi UU No.24 tahun 2011 tentang BPJS. Dalam UU ini, diatur secara jelas mengenai jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua dan jaminan pensiun juga kematian. UU ini harus memberikan perlindungan sosial yang jelas, pasti dan berkesinambungan bagi seluruh masyarakat tanpa kecuali. Jaminan sosial melalui BPJS harus dibangun atas tiga pilar. **Pilar pertama**, adalah pilar bantuan sosial bagi mereka yang miskin dan tidak mampu, atau tidak memiliki penghasilan tetap yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak. Dalam praktiknya, bantuan sosial ini diwujudkan dengan bantuan iuran oleh Pemerintah, agar mereka yang miskin dan tidak mampu, dapat tetap menjadi peserta SJSN. **Pilar kedua**, adalah pilar asuransi sosial yang merupakan suatu sistem asuransi yang wajib diikuti bagi semua penduduk yang mempunyai penghasilan (di atas garis kemiskinan), dengan membayar iuran yang proporsional terhadap penghasilannya/upahnya. Kedua pilar ini merupakan fondasi SJSN untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup layak. **Pilar ketiga**, adalah pilar tambahan atau suplemen bagi mereka yang menginginkan jaminan yang lebih besar dari jaminan kebutuhan standar hidup layak dan mereka yang mampu membeli jaminan tersebut.

(4) UU No.6 tahun 2014 tentang Desa. Dimana terdapat sejumlah argumentasi dan urgensi UU tentang Desa. Per-

tama, untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada di Desa, baik dibidang sosial-budaya dan ekonomi. Kedua, untuk mempercepat pembangunan Desa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat Desa. Ketiga, memperkuat Desa sebagai entitas masyarakat yang mandiri. Keempat, meningkatkan peran aparat pemerintah Desa sebagai garda terdepan dalam pembangunan dan kemasyarakatan dan kelima, meningkatkan partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam membangun Desa.

Audiensi KPAI

Ketua DPR RI menerima kedatangan KPAI dan Komnas Anak. Kehadiran mereka adalah untuk meminta dukungan Ketua DPR RI dalam rangka Pencanangan Gerakan Nasional “Stop Kekejaman terhadap Anak”. Gerakan ini dilatarbelakangi oleh adanya tindakan kekerasan yang masih sering terjadi, terutama akhir-akhir ini, adanya tindakan kekerasan terhadap anak. Hal ini menjadi cermin bahwa kondisi sistem perlindungan anak belum maksimal, karena implementasi dari UU perlindungan anak dan peraturan turunannya belum berjalan secara sistematis dan belum ditangani secara komprehensif. Pencanangan gerakan ini oleh Presiden, tengah mencari waktu dan momentum yang tepat. Diharapkan adanya dukungan dari Ketua DPR RI.

Ketua DPR memberikan respon positif dan apresiasi yang baik atas gerakan nasional tersebut. Ketua DPR juga menyatakan akan melakukan komunikasi dan koordinasi ke Presiden RI. Ada dua hal yang perlu diupayakan. *Pertama*, adalah sosialisasi UU Perlindungan Anak. Dalam hal ini,



Ketua DPR RI Marzuki Alie bertemu dengan KPAI dan kak Seto membahas tentang persoalan anak Indonesia. Pertemuan dilakukan di ruang kerja Ketua DPR RI. Kamis, 20/03.

Ketua DPR RI mendukung adanya kerjasama dan koordinasi dengan KPAI dan Komnas Anak dalam melakukan sosialisasi UU. *Kedua*, bahwa akan berupaya untuk menghadirkan tokoh-tokoh agama sebagai langkah memberikan pemahaman pada masyarakat akan pentingnya pendidikan budi pekerti, nilai agama dan pendidikan, untuk meminimalisir tindakan kekerasan dan kekejaman terhadap anak. ***

Freeport Harus Bangun Smelter di Papua



Tim Kunker Komisi V DPR usai meninjau kawasan Tambang PT Freeport.

Komisi V DPR RI melakukan peninjauan ke tambang bawah tanah PT. Freeport Indonesia di Kabupaten Timika Provinsi Papua. Namun menurut anggota Tim Eriko Sutarduga (F-PDIP) perusahaan ini belum membangun *smelter* sehingga PT. Freeport Indonesia harus segera membangunnya teristimewa Papua.

Dikatakan, Eriko Sutarduga, pihaknya tidak mempersalahkan PT. Freeport dan menghormati perjanjian yang sudah ditandatangani. Tetapi, yang paling penting bahwa Freeport memperhatikan kepentingan masyarakat, sebab sudah sekian lama beroperasi di Papua dan harus bermanfaat bagi rakyat setempat.

“Memang membangun Papua tidak cukup dengan hanya fisik saja, tetapi juga membangun kehidupannya, membangun mentalnya agar masa depan Papua lebih maju sehingga pada gilirannya masa depan Indonesia lebih baik,” tambahnya.

Eriko Sutarduga menegaskan PT. Freeport Indonesia juga harus konsisten dengan tetap mengikuti aturan dimana lima tahun lalu sudah disepakati untuk membangun *smelter*. “Karena bagaimanapun juga, di Indonesialah yang harus dia bangun *smelter*. Bagaimanapun juga Indonesialah, teristimewa Papua adalah tempat dimana tambang itu ada,

tempat dimana kekayaan alam itu diambil dan diproses,” tegasnya setelah kunjungan lapangan dan berdialog dengan Manajemen PT. Freeport Indonesia, di Papua, belum lama ini.

Dengan demikian menurut Eriko, harus ada manfaat yang diperoleh bagi masyarakat Papua, sekaligus bisa menjadi landasan pembangunan bagi Indonesia, karena begitu besar hasil PT. Freeport. “Tambang Freeport Indonesia adalah yang terbesar dan paling menguntungkan di dunia,” ungkapnya.

Belum dibangunnya *smelter* oleh PT. Freeport Indonesia karena masih ada negosiasi terus menerus. “Kami meminta Pemerintah harus tegas, karena telah disetujui sejak 5 tahun yang lalu. Tidak ada kata tidak, kalau masalahnya pendanaan. Saya rasa tidak menjadi suatu permasalahan dengan besarnya hasil penambangan PT. Freeport di Indonesia,” tegasnya.

Eriko tidak menginginkan perusahaan rugi, tetapi jangan sampai sudah sekian puluh tahun yang diterima masyarakat dan negara tidak signifikan. “Lebih *fair*lah dalam pembagiannya, dan kewajiban membangun *smelter*nya supaya diketahui hasil produksi yang sebenarnya,” katanya.

Dia menyambut baik rencana kerja sama dengan perusahaan negara Aneka Tambang (PT.ANTAM) untuk membangun smelter itu, karena akan diketahui hasil sesungguhnya, berapa tembaga, emas, dan lain-lain. Terkait bagi hasil, menurutnya belum wajar.

“Menurut kami Freeport sebagai perusahaan yang profesional di dunia. Marilah bekerjasama, bagaimanapun juga harus menguntungkan semua pihak, baik masyarakat Papua begitu juga Pemerintah Indonesia,” ujar politikus PDI Perjuangan dapil DKI Jakarta II. (As) *foto:agung/parle/hr.*

Ketua DPR Sosialisasi UU Desa ke Pesisir Barat, Lampung

Ketua DPR RI Marzuki Alie menyambangi daerah pemekaran baru Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung, Jum'at (14/3). Tiba di Bandara Radin Inten II Bandar Lampung sekitar pukul 10.30 WIB, Marzuki disambut oleh Wakil Bupati Lampung Selatan Eki Setyanto dan Anggota DPR RI Komisi IX Heriyanto di ruang VIP Bandara. Kedatangannya terkait sosialisasi Undang-Undang tentang Desa bertepatan dengan masa reses sekaligus melihat secara langsung persiapan Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung.

Rombongan kemudian melanjutkan perjalanan melalui jalur darat menuju ke Kabupaten Pesisir Barat, yang merupakan daerah pemekaran baru. Di Pringsewu, Marzuki beserta rombongan menghentikan laju konvoi mobilnya dan menyempatkan diri untuk shalat Jum'at membaaur bersama masyarakat sekitar. Setelah sempat berbincang sejenak dan melayani permintaan foto bersama jama'ah shalat Jum'at, rombongan kembali melanjutkan perjalanan.

Di beberapa titik, konvoi rombongan harus berhenti mendadak menghindari jalan rusak dan berlubang cukup dalam. Demikian pula ketika memasuki kawasan hutan Bukit Barisan, lagi-lagi rombongan harus berhati-hati bahkan banting stir karena menghindari kondisi jalan rusak cukup parah.

Setelah hampir 7 jam perjalanan, menjelang senja sekitar pukul 17.30 WIB Ketua DPR RI bersama rombongan tiba di Kabupaten Pesisir Barat. Ratusan ibu-ibu pengajian dan puluhan orang perangkat desa antusias



Ketua DPR RI Marzuki Alie menjelaskan UU Desa kepada aparat desa di Kab. Pesisir Barat.

menyambut kedatangan Marzuki Alie bersama rombongan.

Dalam sambutannya Marzuki terkesan dengan antusiasme masyarakat Pesisir Barat dengan statusnya sebagai daerah pemekaran baru. Politisi Partai Demokrat ini juga berpesan agar aparat Desa di Wilayah Pesisir Barat mempersiapkan diri dengan program-program yang bisa memajukan desanya.

“DPR sudah mengesahkan UU Desa, dimana nantinya setiap desa berhak mendapatkan dana yang dialokasikan dari APBN sebesar 10% dari Dana Transfer Daerah, jika dikalkulasi nilainya sekitar Rp.700 juta tiap desa per tahun,” jelas Marzuki.

Marzuki menambahkan, bahwa jumlah dana untuk desa tersebut nilainya akan terus meningkat setiap tahunnya, seiring peningkatan jumlah

APBN. Kedepan, perangkat desa juga akan menerima gaji, tapi semua itu masih menunggu aturannya dari kementerian terkait. Dalam menjalankan roda pemerintahan desa, Kepala Desa (Kades) juga akan diawasi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang diisi oleh tokoh-tokoh masyarakat di desa tersebut. “Jadi Kades tidak bisa seenaknya menggunakan anggaran desa, harus ada persetujuan dari BPD. Jika ada yang berani korupsi, siap-siap disekolahkan sama polisi dan jaksa,” kata Marzuki mengingatkan.

Sementara itu, Anggota DPR RI Heriyanto menilai Ketua DPR RI sangat berjasa atas terbentuknya Kabupaten Pesisir Barat. “Beliau datang ke sini karena undangan masyarakat. Pak Marzuki lah yang menandatangani pengesahan Pesisir Barat menjadi Kabupaten,” ungkap Anggota Komisi IX DPR RI itu. (odjie) *foto:odjie/parle/hr.*

Pemerintah Harus Fasilitasi WNI Korban MH 370



Wakil Ketua DPR RI Sohibul Iman.

Sudah sepuluh hari pesawat Malaysia Airlines dengan nomor penerbangan MH370 hilang. Pencarian terus dilakukan, bahkan melibatkan setidaknya 26 negara untuk mencari pesawat yang direncanakan terbang dari Malaysia dan mendarat di Beijing, China.

Setidaknya tujuh Warga Negara Indonesia menjadi penumpang pesawat naas tersebut. Namun, rasa optimisme harus terus dikobarkan, agar pesawat jenis Boeing 777-200 itu dapat segera ditemukan.

“Saya tidak ingin mereka (penumpang dan awak pesawat) tewas.

Saya berharap mereka masih hidup. Tentu kita sangat mendorong kepada pemerintah Malaysia untuk segera menuntaskan ini, dan mereka sudah punya skenario kemungkinan dimana pesawat itu berada,” harap Wakil Ketua DPR RI Sohibul Iman usai menerima kunjungan 450 siswa SMAN 2 Tasikmalaya, di Gedung Nusantara, Rabu (19/03).

Politisi PKS ini menambahkan, poin yang juga harus dijalankan saat ini adalah bagaimana menenangkan keluarga penumpang maupun awak pesawat yang sampai sekarang belum jelas nasibnya. “Jika mereka (keluarga korban) dibutuhkan harus ke Malay-

sia, sebisa mungkin pemerintah kita memberikan fasilitas untuk pergi ke Malaysia,” tambah Sohibul.

Sejauh ini, Pemerintah Indonesia sudah memberikan bantuan sesuai permintaan Pemerintah Malaysia. Depu, Dephub, dan TNI ikut membantu pencarian. “Tentu, karena ini berada di yurisdiksi negara lain, kita tidak bisa serta merta ikut ke sana tanpa ada permintaan. Kebetulan sekarang ada permintaan dari mereka. Jadi, sesuai permintaan kita harus hadir di sana sebagai bagian dari masyarakat dunia. Kita berharap mereka bisa membawa nama baik Indonesia. (mh,sf) foto: andri/parle/iw.

Memprihatinkan, Klaim Jamkesmas Belum Dilunasi

Beberapa rumah sakit mengeluhkan klaim Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) belum dilunasi oleh pemerintah. Padahal, kini Jamkesmas sudah dilebur dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) lewat BPJS Kesehatan. Dampaknya, rumah sakit jadi kesulitan untuk membeli obat-obatan dan alat kesehatan untuk kebutuhan operasional.

Melihat realitas ini, Anggota Komisi IX DPR RI Okky Asokawati yang dihubungi Rabu, (19/3), menyatakan prihatin. Operasional rumah sakit sehari-hari pasti terganggu dan yang paling dirugikan adalah masyarakat sendiri yang ingin mendapat layanan kesehatan. Bahkan, sebagian masyarakat malah ada yang sudah mendaftar jadi peserta JKN dan melunasi iurannya.

“Ini bukti koordinasi lintas sektoral kementerian di pemerintahan tidak baik. Kemenkes dan Kemenkeu saling tunjuk untuk merealisasikan pembayaran piutang tersebut. Masing-masing me-



Anggota Komisi IX DPR RI Okky Asokawati.

rasa benar dengan apa yang sudah dilakukan. Padahal, dengan tertundanya pembayaran piutang tersebut, apapun alasannya, pemerintah belum memprioritaskan pembangunan kesehatan bangsa,” tandas politisi PPP ini.

Seperti diketahui, dari 1.724 rumah sakit yang menjadi mitra Jamkesmas, 1.023 rumah sakit belum menerima klaim Jamkesmas 2013. Klaim JKN 2014 juga mulai menumpuk dari sejumlah rumah sakit. Klaim Jamkesmas 2013 ternyata juga belum dimasukkan ke dalam pagu anggaran 2014. Kemenkes malah mengusulkan agar klaim Jamkesmas 2013 dibayar di luar struktur pagu anggaran 2014.

Okky berharap, klaim Jamkesmas segera dilunasi agar rumah sakit bisa maksimal melayani para pasien. Tidak hanya itu, birokrasi di pemerintahan juga perlu dibenahi. “Pasien sakit tidak bisa menunggu. Dia harus segera diobati. Jumlah pasien bisa terus meningkat dengan kondisi cuaca yang buruk seperti sekarang, baik karena kabut asap di Pekanbaru, erupsi gunung Kelud, dan banjir, otomatis akan menambah besar piutang dan semakin sulit untuk dilunasi,” papar Okky. (mh) iwan armanias/parle.

Impor Bawang Merah Selalu Rugikan Petani

Kebijakan impor bawang merah kerap dilakukan saat masa panen. Harga bawang merah lokal pun akhirnya anjlok. Belakangan pemerintah mengimpor bawang merah sebanyak 75.762 ton pada semester I tahun 2014. Petani bawang selalu merugi akibat kebijakan impor tersebut.

Anggota Komisi VI DPR RI Atte Sugandi (F-PD) yang dihubungi Selasa (18/3), berpendapat, selama kebijakan impor tidak merugikan petani, tentu tidak ada masalah. "Tapi, kalau impor dilakukan sesudah panen, kasihan petani," kata Atte. Produk impor sebenarnya hanya untuk tambahan atau substitusi atas produk lokal yang tersedia di dalam negeri. Untuk itu,



Anggota Komisi VI DPR RI Atte Sugandi.

kebijakan impor harus melihat kondisi produk di dalam negeri.

Saat ini, sudah ada surat keputusan

Dirjen Perdagangan Dalam Negeri soal penetapan impor bawang merah. Bila harga bawang merah sudah mencapai Rp 25.500/kg di tingkat konsumen atau Rp 15.500/kg di tingkat petani, maka impor bisa dilakukan. Menanggapi hal ini, Atte sekali lagi berkomentar, selama tidak berdampak pada petani, impor bawang merah bisa dilakukan.

Namun, jangan sampai petani bawang merah dipaksa memproduksi sebanyak mungkin, lanjut Atte, tapi pemerintah malah mengimpor. Saat ini para petani bawang merah menyalkan kebijakan pemerintah mengimpor bawang merah. Padahal, stok di tingkat petani masih cukup memadai.

(mh) foto: iwan armanias/parle.

Sulteng Perlu Panti Rehabilitasi Narkoba

Anggota Komisi III DPR RI Venna Melinda menyampaikan keprihatinan belum tersedianya panti rehabilitasi narkoba yang memadai di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng). Kondisi ini menurutnya dapat menghambat upaya pendataan pengguna narkoba yang telah mencapai angka 36 ribu orang di provinsi yang berhadapan dengan negara tetangga Filipina ini.

"Data pecandu/pengguna narkoba disini cukup besar, bagaimana solusinya bila para pengguna memerlukan rehabilitasi tapi tidak ada tempat rehab disini," katanya dalam pertemuan dengan jajaran mitra kerja Komisi III di Kantor Polda Sulteng, Palu, Rabu (12/3/14).

Hal ini menurutnya dapat menghambat kelancaran program pendataan pengguna ke Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) sesuai amanat UU no.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Politisi Fraksi Partai Demokrat ini menyatakan dukungan agar pemerintah segera membangun panti rehabilitasi bagi pengguna narkoba di provinsi ini.

Wakil Ketua Komisi III Al Muzammil Yusuf yang memimpin Tim Kunker memberikan saran solusi segera yang dapat dilakukan untuk mengatasi keperluan Panti Rehabilitasi. "Kita bisa belajar dari pengalaman Negara Thailand yang memanfaatkan gedung-gedung negara yang idle (tidak terpakai) untuk digunakan sebagai tempat rehabilitasi," usulnya.

Bicara pada kesempatan yang sama anggota Komisi III Paula Sinjal memberikan catatan tentang kondisi geografis



Tim Komisi III DPR RI mengunjungi panti rehabilitasi narkoba di Sulawesi Tengah.

Provinsi Sulteng yang rawan penyelundupan. "Garis pantai barat yang panjang sering digunakan oleh kapal kecil untuk menyelundupkan narkoba. Ini perlu jadi perhatian dari Polisi Air untuk meningkatkan patroli memonitor penyelundupan di laut," tekannya.

Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Sulteng, Sutarso mengakui kondisi geografis yang sulit masih jadi kendala terlaksananya Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba - P4GN. Belum adanya Tempat Rehabilitasi yang memadai membuat proses rehabilitasi masih dikirim ke Baddoka Makassar dan Lido Bogor.

(iky) foto:rizka/parle/hr.

Pemerintah Selalu Telat Tangani Bencana Asap

Bencana kabut asap dari pembakaran hutan di Riau telah membawa banyak petaka bagi masyarakat di Provinsi Riau dan sekitarnya. Penanganan yang cepat dan tepat belum maksimal dilakukan, baik oleh pemerintah daerah dan pusat.

Wakil Ketua DPR RI M. Sohibul Iman, berkomentar bahwa pemerintah kita memang selalu telat bila menanggulangi bencana asap dari pembukaan lahan hutan. Kasus ini bukan yang pertama. Bahkan, sudah sering terjadi setiap tahun.

“Sejauh ini, saya melihat pemerintah selalu telat. Jadi, setelah banyak menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat, pemerintah baru serius. Tapi walau demikian, saya sangat



Wakil Ketua DPR RI Sohibul Iman.

mengapresiasi langkah-langkah terakhir yang sudah dilakukan pemerintah. *Better late than never*,” katanya, usai menerima para siswa SMAN 2 Tasikmalaya, di DPR, Rabu (19/3).

Sohibul Iman berharap, setiap kali ada bencana asap di lahan hutan, pemerintah bisa segera cepat tanggap menanggulungnya. Jangan sampai masyarakat terlalu banyak yang menjadi korban, karena tindakan yang lamban. Kini, para pembakar hutan sudah diajukan ke pengadilan untuk diadili. “DPR tidak bisa mencampuri urusan hukumnya. Tentu, DPR sangat menghormati dan tentu mendorong setiap ada proses hukum yang dilakukan pemerintah,” terangnya.

Menyinggung sikap Presiden SBY yang mendatangi lokasi bencana kebakaran hutan di Riau, Sohibul menilai sebagai langkah positif. Namun, tanpa kehadiran presiden pun, mestinya dia bisa memerintahkan para menteri untuk cepat bertindak. (mh, sf) foto:andri/parle/iw.

Komisi IX Pantau Implementasi Rekomendasi Panja *Outsourcing*



Tim Komisi IX DPR RI gelar pertemuan dengan Wagub DIY dan jajarannya.

Anggota Komisi IX DPR Didik Salmijardi mempertanyakan implementasi rekomendasi Panja *Outsourcing* Komisi IX dengan Meneg BUMN yang diputuskan dalam Raker Komisi IX DPR Selasa (4/3) pekan lalu. Apakah rekomendasi tersebut sudah sampai ke DIY termasuk Kabupaten Sleman. Salah satu yang perlu dicermati adalah karyawan BUMN yang sudah di PHK akan dipekerjakan kembali.

Hal itu diungkapkan Didik ketika menggelar pertemuan dengan Wagub DIY Sri Paku Alam IX dan Bupati Sleman, baru-baru ini. Tim Kunker Komisi IX DPR yang dipimpin Wakil Ketua Soepriyatno, selain menyerap masukan berbagai instansi pasangan kerja, juga memantau tindak lanjut

hasil-hasil rapat Komisi dengan pemerintah.

Menanggapi pertanyaan politisi Partai Demokrat Didik Salmijardi, Kepala Disnaker Yogyakarta menyatakan siap melaksanakan Rekomendasi Panja *Outsourcing* Komisi IX DPR. Tindaklanjutnya adalah pejabat Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial (PHI) dan Pengawasan Kemenakertrans dan pejabat Eselon I BUMN menggelar rapat untuk melaksanakan rekomendasi yang diberi waktu dari 12 Maret hingga 12 April 2014.

“Karena itu dari Disnaker Yogyakarta belum bisa menyampaikan hasilnya karena sedang dalam pembahasan intensif,” ungkapnya.

Sementara itu, sosialisasi Rekomendasi Panja *Outsourcing* khususnya karyawan BUMN yang akan diperjakan kembali belum sampai di Kabupaten Sleman. Menurut Kepala Disnakersos kepada Tim Kunker Komisi IX DPR, pihaknya baru menerima informasi sekarang ini. Tetapi untuk di Sleman, PHK angkanya relatif kecil dan itu sudah bisa diatasi.

“Kami bersyukur para mediator kami bisa menyelesaikan melalui pertemuan Tripartit karena menyangkut hubungan industrial antara buruh dan majikan. Hubungan industrial di Sleman masih cukup kondusif,” ujarnya. (mp) foto: mastur/parle/iw.

Dinas Sosial Diminta Kerjasama Lakukan Pendampingan

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ledia Amalia Hanifa berharap agar Dinas Sosial bekerjasama dengan instansi terkait lainnya dalam memberikan pendampingan terhadap penerima KUBE (Kelompok Usaha Bersama). Hal tersebut disampaikan Ledia saat mengunjungi langsung kelompok usaha bersama Musyid Maju, salah satu penerima program KUBE di Pontianak, Kalimantan Barat, baru-baru ini.

“Kelompok usaha bersama Mursyid Maju ini memilih usaha keramba ikan dalam penggunaan dana bantuan program KUBE dari Kementerian Sosial. Kami lihat sendiri disini, Alhamdulillah sejauh ini usaha keramba ikan ini berjalan dan sebentar lagi sudah bisa dipetik hasilnya alias dipanen. Namun disini kami mendapat masukan bahwa mereka masih kesulitan mendapatkan pelet atau pakan ikan,” ujar Ledia.

Untuk itu, ia berharap agar dinas sosial sebagai pendamping KUBE dapat bekerja sama dengan instansi terkait dalam melakukan pendampingan. Misalnya bekerjasama dengan dinas perikanan untuk bisa mendapatkan pakan ikan atau pelet dengan harga yang terjangkau.

Tidak hanya itu, untuk tahap selanjutnya Ledia juga berharap agar dinas sosial juga melakukan pendampingan dalam pemasarannya. Sehingga penerima KUBE tidak merasa sia-sia akan hasil usahanya tersebut.

“Dengan adanya pendampingan dari awal hingga ke ta-



Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ledia Amalia Hanifa.

hap pemasarannya ini, Insya Allah usaha ini akan dapat berjalan dan berkembang, hingga akhirnya tujuan utama dari KUBE ini, memandirikan kelompok masyarakat yang kurang beruntung dapat tercapai,” jelasnya.

Ledia juga menekankan bahwa program ini bukan bagi-bagi uang semata, tapi bagaimana memandirikan kelompok masyarakat ekonomi lemah untuk mandiri dan akhirnya bisa meningkatkan ekonomi keluarga untuk selanjutnya. Sebagaimana ketentuan dinas sosial, setiap KUBE yang terdiri dari 10-20 keluarga mendapat bantuan modal usaha sebesar 20 juta rupiah. (Ayu) foto: ayu/parle/iw.

Komisi V Apresiasi Pemanfaatan Tailing di Kota Timika

Komisi V DPR RI dalam Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2013-2014 melakukan kunjungan Kerja (Kunker) di Provinsi Papua, meninjau jalan nasional dan jembatan lintas Timika-Paumako. “Komisi V melihat secara langsung lokasi dan mengapresiasi pemanfaatan tailing di Kota Timika,” kata Wakil Ketua Komisi V Michael Wattimena, belum lama ini, di Timika, Papua.

Komisi V menyaksikan kondisi jalan ruas Timika-Waghete dengan panjang total 143,510 Kilometer (Km), yaitu jalan yang telah terbuka 121,220 Km, jalan yang sudah diaspal dengan komposisi tailing 64,400 Km, jalan tanah dengan menggunakan timbunan pilihan 56,820 Km, dan jalan yang belum



Timunjaan kerja Komisi V DPR RI meninjau jalan nasional dan jembatan lintas Timika-Paumako.

terbuka (masih hutan) 22,290 Km.

Michael Wattimena mengatakan di Timika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, didapat material yang berukuran seperti pasir yang merupakan limbah dari PT. Freeport Indonesia sebagai bahan hasil buangan dari proses penambangan bijih emas dan tembaga, yang disebut dengan *tailing*.

Tailing PT. Freeport ini sudah dihasilkan sejak lebih dari 30 tahun lalu jumlah produksi sekitar 80.000-100.000 ton per hari. Jumlah ini terus meningkat setiap tahun dan sekarang sudah mencapai 300 ribu ton per hari.

Tailing ini mempunyai komposisi bahan sekitar 75% kuarsa, 23% oksida besi, 2% mica, dan feldspar. “Dengan melakukan pengkajian terhadap sifat-sifat bahan ini, baik sebelum dan sesudah dicampur dengan bahan pengikat

aspal, akan memberikan jawaban terhadap kegunaan dan pemanfaatan *tailing* dalam konstruksi jalan,” papar Michael Wattimena.

Dalam proses penelitian, menurutnya, selain dilakukan uji coba di laboratorium juga perlu dilakukan uji coba skala penuh di lapangan. Tujuan dari uji coba skala penuh adalah untuk mengetahui karakteristik perkerasan jalan di lapangan dengan menggunakan *tailing* sebagai bahan perkerasan jalan. Selain itu, juga untuk mendapatkan sifat-sifat teknis bahan *tailing*, komposisi campuran dan karakteristik campuran *tailing* dengan agregat untuk lapis pondasi dan campuran beraspal panas.

Dari hasil penelitian, dikatakan Michael Wattimena, diperoleh keunggulan dari pemanfaatan *tailing* adalah pertama, sebagai penggunaan *tailing*

dalam proses pengerasan jalan, berarti mengurangi dampak pencemaran lingkungan akibat proses penambangan.

Kedua, apabila dibandingkan dengan spesifikasi bahan yang ada, *tailing* dapat digunakan untuk bahan konstruksi jalan maupun jembatan, baik sebagai substitusi agregat maupun sebagai bahan pengisi (*filler*).

Ketiga, dalam bidang konstruksi jalan *tailing* ini dapat dimanfaatkan untuk bahan lapis permukaan, lapis pondasi, lapis pondasi bawah. Sedangkan untuk konstruksi jembatan dapat dimanfaatkan sebagai substitusi sebagian agregat sedang dan pasir.

“Dengan kata lain, penggunaan *tailing* adalah penerapan teknologi ramah lingkungan,” imbuh Michael Wattimena. (As) foto: agung/parle/hr.

Komisi VIII Berharap Jumlah Panti Asuhan Anak Cacat Ditingkatkan



Ketua Komisi VIII DPR RI Ida Fauziyah meninjau panti asuhan Bhakti Luhur di Kotabaru, Pontianak.

Ketua Komisi VIII DPR RI, Ida Fauziyah berharap peningkatan jumlah panti asuhan bagi anak-anak dengan kecacatan berat.

“Tentu tidak mudah merawat dan mendidik anak-anak dengan kecacatan berat seperti yang telah dilakukan

panti asuhan Bhakti Luhur di Kotabaru, Pontianak Kalimantan Barat,” ujar Ida saat memimpin Tim Kunker Komisi VIII ke Panti Asuhan Bhakti Luhur, Pontianak, baru-baru ini.

Dilanjutkannya, sesungguhnya apa yang dilakukan oleh pengelola panti

asuhan ini telah meringankan bahkan mengambil alih tugas negara dalam memberikan perlindungan dan kehidupan yang layak bagi anak-anak Indonesia.

Ida berharap agar dinas sosial tetap memberikan perhatian yang besar kepada panti asuhan-panti asuhan seperti Bhakti Luhur ini. Bahkan pihaknya berharap agar semakin banyak orang yang tergerak hatinya untuk berbuat serupa bagi anak-anak dengan kecacatan berat.

Panti Asuhan Bhakti Luhur yang terletak di jalan Wonoyoso, Kotabaru Pontianak Kalbar ini berdiri sejak 20 Agustus 2002 silam, telah merawat sekitar 40 anak dengan kecacatan seperti penderita hidrocephalus, tuna wicara, maupun cacat fisik lainnya.

Namun di Kalbar sendiri menurut Kepala Dinas Sosial Kalbar ada sekitar 148 panti asuhan anak, 136 nya sudah terakreditasi dan terdaftar, dengan total anak asuh sebanyak 5.670 anak. (Ayu) foto: ayu/parle/iw.

Komisi X DPR Pertanyakan Penerimaan CPNS Bagi Disabilitas

Anggota Komisi X DPR RI Nurul Qomar mempertanyakan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Pasalnya, Politisi Demokrat ini melihat di daerah lain ada PNS yang memiliki kebutuhan khusus atau disabilitas.

Pertanyaan ini ia sampaikan dalam rangkaian kunjungan kerja Komisi X DPR ke Provinsi Kalimantan Tengah, baru-baru ini, yang dipimpin Ketua Komisi X Agus Hermanto.

“Apakah di Provinsi Kalteng ini ada karyawan ataupun pegawainya yang berkebutuhan khusus diangkat menjadi PNS? Didaerah lain yang kami temui ada orang yang berkebutuhan khusus seperti tunanetra, tapi jabatannya sudah Kepala Sub Bagian,” tanya Qomar di Aula Jayang Tingang, Kalteng, pekan lalu.

Selain itu, Qomar juga meminta Pemprov agar memberikan peluang untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) kepada orang yang berkebutuhan khusus tersebut.

Menanggapi hal ini, Wakil Gubernur Kalteng Achmad Diran, tampak harus berpikir terkait usulan tersebut untuk memberikan peluang yang sama bagi disabilitas.

“Memang untuk saat ini belum ada perekrutan CPNS untuk orang berkebutuhan khusus, dan ini menjadi masukan



Tim Kunjungan Komisi X DPR RI meninjau SMKN II Kalteng.

yang baik untuk kita,” kata Achmad.

Selain itu, Qomar juga turut prihatin dengan kondisi Provinsi Kalteng terkait buta aksara. Disebutkannya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa Kalteng sepuluh besar provinsi dengan buta aksara terbanyak.

“Kalau dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kita belum bagus sekali. IPM indikatornya adalah tingkat pendidikan, tingkat buta aksara, angka kematian ibu dan anak bayi saat persalinan,” ujar Politisi asal Dapil Jawa Barat ini. (hr) foto: eka hindra/parle.

Komisi V Pantau Kondisi Infrastruktur di NTT



Tim kunjungan kerja Komisi V meninjau infrastruktur di NTT.

Komisi V DPR memantau pembangunan infrastruktur di NTT khususnya yang menggunakan dana APBN. Pasalnya, masih ada sejumlah fasilitas infrastruktur yang masih belum diselesaikan.

Tim kunjungan kerja komisi infrastruktur dan perhubungan ini berjumlah sekitar 20 orang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi V DPR Laurens Bahang Dama dari Fraksi PAN.

Tim memantau sejumlah infrastruktur diantaranya pem-

angunan bandara, rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dan pembangunan jalan poros tengah di daratan Timor.

“Tujuan kita melakukan Kunker ke NTT untuk mengetahui dan mengawasi anggaran infrastruktur yang dibiayai oleh APBN, juga ingin mengetahui kendala di lapangan, serta menyerap aspirasi dari Pemda, forum komunikasi daerah dan masyarakat,” ujar Laurens Bahang Dama kepada wartawan, baru-baru ini.

Menurutnya, usulan dari masyarakat nantinya akan dibahas di DPR dan usulan itu juga dapat dimasukkan ketika pembahasan APBNP 2014 dan anggaran 2015 setelah reses nanti.

Dia menambahkan, jika ada persoalan Komisi V DPR juga dapat langsung memanggil pemerintah dalam Rapat Kerja di DPR mendatang.

Dia mengatakan, kita semua akan bahu membahu memperjuangkan aspirasi masyarakat disini. “Di Komisi V DPR tidak ada sekat Fraksi yang ada bersama menyelesaikan persoalan infrastruktur dengan Pemerintah pusat maupun daerah,” terangnya. (si) foto:sugeng/parle/hr.

Komisi II Kunjungi KPU Sumsel



Suasana rapat tim kunker Komisi II DPR RI dengan Ketua KPU Sumsel.

Pemerintah Sumatera Selatan (Sumsel) sudah berbenah diri menyukseskan Pemilu 2014. Dari pengamanan logistik, pemutakhiran DPT, penyempurnaan data penduduk, hingga penertiban atribut partai.

Demikian dikemukakan Ketua Tim Kunker Komisi II DPR Khatibul Umam Wiranu saat pertemuan dengan Ketua KPU Sumsel Asfahani dan Ketua Bawaslu Sumsel, baru-baru ini. Dalam pertemuan tersebut Komisi II DPR ingin mengetahui lebih jauh persiapan Pemilu serta masukan yang signifikan soal Pemilu.

Ketua KPU Sumsel mengungkapkan, ada sedikit masalah yang ditemukan di lapangan, yaitu ada beberapa penduduk yang secara fisik ada tapi secara administratif tidak ada. Artinya, mereka tidak memiliki KTP dan tidak terdaftar dalam DPT.

Namun demikian secara umum persiapan teknis Pemilu 2014 sudah 90 persen. Pada 20 Maret, KPU Sumsel sudah membenahi surat suara. Sementara Ketua Bawaslu Sumsel menyampaikan bahwa pihaknya akan merekrut relawan pengawas Pemilu dari penduduk yang tinggal di TPS tanpa dibayar. (mh) foto:husen/parle/iw.

Kesuksesan Pemilu Ditentukan Netralitas Polri

Netralitas Polri berbanding lurus dengan stabilitas dan kesuksesan Pemilu. Untuk itu, dibutuhkan Polri yang profesional dan memahami betul perannya dalam pesta demokrasi di Indonesia.

Demikian ditegaskan Anggota Komisi II DPR M. Unais Ali Hisyam (F-PKB) di Palembang, Sumsel, baru-baru ini, saat mengikuti pertemuan dengan jajaran Pemprov dan Polda Sumsel dalam rangkaian kunjungan kerja Komisi II.

Unais menghimbau agar Polda Sumsel mampu mende-teksti dini potensi kecurangan yang kerap terjadi. Selain netralitas Polri, persoalan logistik Pemilu di Sumsel juga terungkap. Ternyata banyak kotak suara rusak saat didistribusikan ke berbagai wilayah di Sumsel. Ada juga yang tercebur ke sungai dan laut, sehingga KPU Sumsel kekurangan kotak suara.

Untuk menutupi kekurangan kotak suara, baik Polda dan KPU telah menggantinya dengan kotak suara kardus dan sebagian menggunakan aset kotak suara Pemilukada yang lalu. Komisi II DPR telah meminta Polda Sumsel untuk mengamankan logistik Pemilu. (mh) foto:husen/parle/iw.



Anggota Komisi II DPR M. Unais Ali Hisyam.



Panti Sosial Tresna Werdha Jambi Bisa Jadi Percontohan

Anggota Komisi VIII DPR RI yang tergabung dalam tim kunjungan kerja ke Provinsi Jambi memberikan apresiasi kepada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Panti Sosial Tresna Werdha Budi Luhur, Jambi. Bahkan, mereka menilai panti ini bisa dijadikan percontohan untuk panti sosial di daerah lain.

“Panti sosial ini, kita melihat sudah sesuai dengan harapan Komisi VIII. Fasilitas yang ada di dalamnya, bisa menjadi standar bagi panti yang lain, dan di daerah lain,” jelas Anggota Komisi VIII Idris Lena, di Jambi, belum lama ini.

Hal senada diungkapkan Anggota Komisi VIII Yunus Roichan. Ia menilai, panti sosial Budi Luhur ini dapat menjadi contoh, karena segala aspek sudah cukup bagus dan memadai.

“Saya belum lihat di daerah lain ada (panti) yang seperti ini. Semoga panti ini bisa menjadi contoh daerah lain. Infrastrukturnya bagus, gedungnya juga bagus. Fasilitas juga cukup memadai,” imbuh Yunus.

Terkait dengan kegiatan untuk para lansia, Yunus menyatakan, lansia ini harus diberi kegiatan atau aktifitas yang cukup, namun tidak memberatkan. Karena faktor fisik sangat berpengaruh ketika lansia ini beraktifitas.

“Orang tua bisa diberi kegiatan, yang sesuai dengan kemampuan dan keahlian mereka, namun tidak memberatkan. Karena sebagaimana kita tahu, faktor fisik para lansia ini tidak sekuat ketika muda,” pesan Politisi Demokrat ini.



Tim kunker Komisi VIII DPR RI kunjungi Panti Sosial Tresna Werdha Budi Luhur, Jambi.

Saat ini Panti Sosial Budi Luhur menampung 70 orang lansia, dengan usia berkisar 60 sampai 87 tahun. Setiap lansia mendapat jatah kamar masing-masing, dengan mendapat bantuan tenaga pengasuh sebanyak 20 pegawai negeri sipil.

Dari pantauan Tim Parle, kondisi panti cukup bersih. Fasilitas juga cukup memadai, termasuk kebersihan dan kenyamanan lingkungan bagi para lansia.

Sementara itu, Anggota Komisi VIII Ahmad Rifai Suftiadi menegaskan bahwa lansia ini harus mendapatkan perhatian dari negara. Diharapkan, para lansia tetap mendapatkan hidup yang layak.

“Masalah panti ini merupakan tanggung jawab negara. Kita perlu mem-

perhatikan para lansia, terutama bagi para lansia yang tidak mampu. Bukan hanya di pusat, tetapi juga di daerah. Saya berharap anggaran untuk panti ditingkatkan. Terutama untuk infrastrukturnya, agar para lansia ini dapat hidup dengan layak,” kata Ahmad.

Ahmad juga menyatakan, kegiatan sehari-hari para lansia harus diisi dengan kegiatan yang positif, sehingga lansia ini tidak jenuh.

“Banyak hal yang bisa dilakukan bagi penghuni panti, agar mereka tidak jenuh. Namun, kegiatan ini harus disesuaikan dengan keahlian mereka, seperti keahlian membuat kerajinan tangan, berocok tanam, atau memelihara ikan, ataupun kegiatan ringan yang lain agar para lansia ini dapat mengisi hari-harinya dengan *happy*,” jelas Politisi Demokrat ini. (sf) foto: sofyhan/parle/iw.

Tidak Ada Alasan Bagi Pemerintah Untuk Impor Pangan

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Firman Subagyo menilai tidak ada alasan apapun bagi Pemerintah untuk impor pangan. Sekalipun beberapa waktu lalu

sempat terjadi bencana di beberapa wilayah di Indonesia, yang notabene merusak berbagai lahan pertanian dan perikanan. Hal tersebut diungkapkan

Firman kepada wartawan, baru-baru ini di gedung DPR.

“Bencana itu merupakan kejadian

yang mempengaruhi semua bidang, tetapi ketika produksi pangan kita mencukupi tidak ada alasan untuk impor. Jangan sampai hal ini dijadikan celah oleh pelaku pedagang kotor untuk dijadikan pembenaran bahwa ini harus impor pangan,” jelas Firman.

Pemerintah harus segera membuat neraca kebutuhan pangan nasional dan neraca produksi pangan nasional. Jangan sampai jika ada bencana alam pemerintah tidak punya data valid terhadap masalah produksi pangan nasional. Hingga pada akhirnya hal tersebut bisa menjadi pintu masuk bagi pemerintah untuk melakukan impor besar-besaran. Padahal di dalam Undang-undang Pangan yang baru direvisi dijelaskan, bila produksi pangan nasional mencukupi dan cadangan pangan nasional mencukupi itu, tidak boleh melakukan impor.



Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Firman Subagyo.

Bahkan, dari hasil penelitian Prof Khudori, Ahli Dewan Ketahanan Pangan Nasional mengatakan bahwa cadangan pangan nasional mencukupi. Bulog pun mengatakan cadangan pangan nasional mencukupi, dan pertanian mencukupi. Sehingga tidak ada alasan apapun mengimpor beras untuk kepentingan nasional.

Dilanjutkan Politisi dari Fraksi Golkar ini, terkait dengan bencana yang sempat merusak lahan pertanian, peternakan dan hutan, Komisi IV juga meminta harus dibuat evaluasi terhadap masalah kerugian akibat bencana alam. Selain itu, pemerintah juga harus secepatnya memberikan ganti rugi kepada petani dan nelayan termasuk biaya produksinya. Sementara untuk mekanisme pengadaan barang harus dikoordinasikan dengan aparat hukum.

“Bagi mereka yang mempunyai pinjaman di bank, harus segera dilakukan revisi hutang, termasuk penghapusan beban bunga. Hal tersebut harus diprioritaskan untuk petani miskin dengan kategori lahan di bawah dua hektar,” tegas Firman. (Ayu)/foto:iwan armanias/parle.

DPR Dukung Program Pemkab Pro Rakyat



Ketua DPR RI Marzuki Ali.

Ketua DPR RI Marzuki Ali mendukung Pemerintah Kabupaten (Pemkab) yang memiliki berbagai program yang bertujuan menyejahterakan rakyat (pro rakyat). Hal tersebut disampaikan Marzuki saat menghadiri pengukuhan Tim 3 (tiga) Zero Jefry Noer Center (JNC) di Lapangan Kantor Camat Kampar Timur, Kabupaten Kampar, belum lama ini.

Dipaparkannya, DPR RI mendukung program peningkatan ekonomi rakyat, peningkatan sumber daya manusia (SDM) melalui pengesahan berbagai peraturan perundang-

undangan agar bisa menjadi landasan hukum bagi pemerintah pusat maupun daerah termasuk pemkab dalam menjalankan kebijakan.

“Banyak undang-undang terkait kesejahteraan rakyat sudah kita lahirkan. Saya menghimbau masyarakat dapat mengetahui dan memahami UU apa saja yang sudah dihasilkan melalui tayangan berita di televisi atau menanyakan kepada pemerintah daerah,” ucapnya.

Ditambahkan Marzuki, dirinya selaku Ketua DPR RI berusaha aktif turun ke pelosok Indonesia guna mensosialisasikan berbagai UU yang sudah disahkan DPR. Antara lain UU Desa, UU Perlindungan Petani, UU Jaminan Kesehatan Nasional dan UU lainnya.

“Ketika Kampar sudah mendahului program pengobatan gratis, KTP gratis dan sekolah gratis, itu artinya Pemkab Kampar sudah memiliki inisiatif untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakatnya,” kata Marzuki.

Bupati Kampar Jefry Noer dalam sambutannya mengatakan, program lima pilar yang digagasnya bermuara pada zero kemiskinan, pengangguran dan rumah kumuh. “Kita berusaha berbuat yang terbaik bagi masyarakat, semoga tujuan ini bisa tercapai setidaknya awal 2015,” ujarnya. (odjie) foto: odjie/parle/iw.

Wakil Bicara



Wakil Ketua Komisi V DPR Muhidin M Said

“Jembatan Sukarno yang sudah 10 tahun terbengkalai ini sudah lama diimpikan rakyat Manado, bagaimanapun pembangunannya harus dituntaskan. Kalau koordinasi Pemerintah Daerah, Kementerian PU dan Kementerian Perhubungan dapat berjalan dengan bagus, maka rakyat segera dapat menikmati.”

“Soal klaim Jamkesmas 2013 yang belum dilunasi pemerintah, ini bukti koordinasi lintas sektoral kementerian di pemerintahan tidak baik. Kemenkes dan Kemenkeu saling tunjuk untuk merealisir pembayaran piutang tersebut. Masing-masing merasa benar dengan apa yang sudah dilakukan. Padahal, dengan tertundanya pembayaran piutang tersebut, apapun alasannya, pemerintah belum memprioritaskan pembangunan kesehatan bangsa.”



Anggota Komisi IX DPR Okky Asokawati



Anggota Komisi VI DPR Atte Sugandi

“Jangan sampai petani bawang merah dipaksa memproduksi sebanyak mungkin, tapi pemerintah malah mengimpor. Saat ini para petani bawang merah menyesalkan kebijakan pemerintah mengimpor bawang merah. Padahal, stok di tingkat petani masih cukup memadai.”

Ketua DPR Fasilitasi Pertemuan DIKTI, APTISI dan ABPPTSI



Ketua DPR RI Marzuki Alie.

Ketua DPR RI, Marzuki Alie untuk kedua kalinya memfasilitasi pertemuan antara Dirjen Pendidikan Tinggi (DIKTI) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI), dan Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ABPPTSI), baru-baru ini di Gedung Parlemen Senayan Jakarta.

“Ketika saya mengunjungi berbagai daerah sering mendapat masukan dari

berbagai Perguruan Tinggi Swasta tentang sulitnya mendapat akreditasi. Bahkan sekitar 30 ribu PTS yang harus diakreditasi, BAN (Badan Akreditasi Nasional) hanya 60 Perguruan Tinggi yang mendapat akreditasi,” ungkap Marzuki Alie.

Saat itu dilanjutkan Marzuki, pihaknya juga pernah mengatakan kepada Dirjen DIKTI jika hanya 10 persen PTS yang mendapat akreditasi BAN atau dengan kategori legal, maka sebanyak sembilan puluh persen PTS dapat bubar. Karena jumlah PTS di Indonesia sendiri jumlahnya 95 persen, sementara PTN hanya 5 persen. Oleh karena itulah Marzuki berharap agar dalam pertemuan tersebut menghasilkan solusi atau jalan keluar bagi semua pihak.

Di hadapan Ketua DPR, Buchori yang merupakan wakil dari APTISI Sumatera bagian selatan mengkritisi kebijakan dari DIKTI yang akan mempublikasikan daftar PTS legal dan non legal pada 17 Maret mendatang. Dimana dari seluruh PTS yang ada hanya sekitar 10 persen yang mendapat predikat legal.

Hal tersebut tentu sangat meresah-

kan PTS yang ada, pasalnya predikat legal dan non legal tersebut merupakan bahasa hukum, bukan bahasa dunia pendidikan. Hal senada juga disampaikan oleh berbagai wakil APTISI lainnya seperti Medan, Ambon, dan Papua.

Selain itu APTISI dan ABPPTSI juga berharap agar DIKTI mengkaji ulang kebijakan rasio dosen yang dibatasi usia 50 tahun. Padahal sebagaimana amanat UUD 1945 dimana mencerdaskan seluruh bangsa Indonesia. Menurut rakyat yang tak terbatas usia pun memiliki hak untuk ikut mencerdaskan bangsa tanpa dihalangi oleh batasan usia.

Khusus untuk Papua, wakil APTISI dari Indonesia bagian Timur ini mengatakan bahwa Bantuan Mahasiswa Miskin tidak dapat dijangkau mahasiswa miskin di Papua. Mengingat salah satu persyaratannya dimana yang mendapat bantuan haruslah perguruan tinggi dengan akreditasi minimal B. Sementara pada kenyataannya PT di Papua lebih banyak mendapat akreditasi C. Atas dasar itulah maka wakil dari Papua meminta agar kebijakan tersebut dikaji kembali.

(Ayu) foto: iw,odjie/parle/iw.

Parlemen Uganda Didominasi Perempuan

Parlemen Uganda ternyata didominasi perempuan hingga mencapai 53%. Hal yang membuat para anggota BURT DPR tercengang. Bahkan, Ketua Delegasi Parlemen Uganda Hon Fox Odoi Aweyelowo sempat berseloroh, banyak anggota parlemen Uganda yang pria ingin ikut berkunjung ke Indonesia, karena ingin menghindari kepungan para perempuan di parlemen Uganda.

Anggota BURT Agus Sulistiono (F-PKB) mengaku kaget mendengar penjelasan delegasi Parlemen Uganda tersebut. “Saya juga sempat kaget. Selama ini saya belum pernah mempelajari negara Uganda. Di parlemennya,



Anggota BURT DPR RI Agus Sulistiono.

perempuan ternyata lebih dari separuh. Sementara di Indonesia masih memberikan peluang untuk perempuan sebesar 30% di parlemen,” kata Agus yang ditemui usai pertemuan dengan Parlemen Uganda di ruang BURT, baru-baru ini.

Bahkan, menurut penjelasan delegasi Parlemen Uganda, kaum perempuan Uganda diberi tempat untuk menjadi salah satu pimpinan di berbagai lembaga negaranya. Perempuan sangat diapresiasi perannya. Namun, dari 10 orang delegasi parlemen Uganda yang berkunjung ke DPR, hanya membawa 2 orang perempuan. Hon Lanyero Sarah

Ochieng, anggota Parlemen Perempuan Uganda mengaku senang bertemu para anggota BURT yang kebanyakan didominasi kaum perempuan saat menerima kunjungan tersebut.

Pada bagian lain, delegasi Parlemen Uganda juga menjelaskan tentang berbagai fasilitas yang diterima para anggota parlemennya. Di Uganda, setiap wakil rakyatnya diberi fasilitas mobil, rumah tinggal, dan dana pensiun yang

diambil 30% dari gaji yang diterimanya setiap bulan. Tukar menukar info dan fakta kinerja dari kedua parlemen ini menjadi perbincangan menarik dalam pertemuan tersebut. (mh), foto : naefurodjie/parle/hr.

Terkait RUU Tapera, Wapres Boediono Didesak Segera Koordinasi Dengan Kementerian

Anggota DPR Abdul Hakim dari Fraksi PKS mendesak Wapres Boediono untuk melakukan koordinasi dan menyamakan persepsi antar lembaga terhadap RUU Tapera yang masih terkatung-katung pembahasannya di DPR.

“RUU ini telah mengalami perpanjangan tiga kali masa persidangan, dan RUU ini juga telah dibawa dalam Rapat Konsultasi dengan Presiden dimana disimpulkan Presiden menugaskan Wapres untuk mengkoordinasikan perbedaan pandangan antar lembaga,” ujarnya saat Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Pramono Anung, di Gedung Nusantara II, baru-baru ini.



Anggota Komisi V DPR RI Abdul Hakim.

Menurut Abdul Hakim, RUU Tapera merupakan usulan Dewan, karena DPR menginginkan terpenuhinya kebutuhan mendasar rakyat terhadap Perumahan. “Pasal 28 H menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan,” katanya.

Dia menambahkan, saat ini negara hanya bisa memberikan subsidi dari APBN sebesar 400 ribu. sementara terkait subsidi, terdapat 13.6 juta Rumah tangga yang masih belum memiliki rumah tangga yang layak huni. (si) foto : iwan armanias/parle.

Polda Sumsel Kekurangan Personil Untuk Amankan Pemilu

Keterbatasan personil membuat Polda Sumatera Selatan (Sumsel) kewalahan dalam mengamankan pemilu 2014. Untuk itu Polda Sumsel akan merekrut Linmas (perlindungan masyarakat) guna menutupi kekurangan personil keamanan.

Demikian mengemuka dalam pertemuan kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke Palembang, Sumsel, baru-baru ini. Ketua tim kunker Khatibul Umam Wiranu (F-PD) melakukan pertemuan dengan Wakil Gubernur Sumsel Ishak Meki, Kapolda Sumsel Saut Usman Nasution, Ketua KPU, dan semua Kapolres se-Sumsel.

Para anggota Komisi II DPR yang ikut menghadiri pertemuan tersebut adalah Azhar Romli (F-PG), Agustina Basik (F-PG), Rahadi Zakaria (F-PDI Perjuangan), Eddy Mihati (F-PDI Perjuangan), Herman Kadir (F-PAN), M.Unais Ali Hisyam (F-PKB), dan Mestaryana Habie (F-Gerindra).

Dari 17.906 TPS yang ada di Sumsel, Polda Sumsel tidak bisa menempatkan satu personil keamanan untuk satu TPS. Di Sumsel sendiri ada 15 kabupaten/kota yang melingkupi



Ketua tim kunker Komisi II DPR RI Khatibul Umam Wiranu.

daerah terpencil di lautan dan hutan.

Untuk merekrut Linmas, Polda Sumsel tidak memiliki anggarannya. Untuk itu, pihaknya minta dukungan kepada

Komisi II DPR agar menambah anggaran pengamanan pemilu di Sumsel. Jumlah personil Linmas yang dibutuhkan Polda Sumsel sekitar 13.860 orang.

Namun hingga kini rekrutmen Linmas belum jelas karena

ketiadaan anggaran, sementara Pemilu tinggal beberapa hari lagi. Bila anggaran tak mendukung, mungkin 2 (dua) TPS dijaga 1 (satu) personil, walau tetap saja kekurangan. Sementara anggaran Polda Sumsel untuk pengamanan Pemilu mencapai Rp 45.740.590.488. (mh) foto:husein/parle/iw.

DPR Terima Daftar PPTKIS Yang Terkena Sanksi Skorsing

Berdasarkan Rapat Dengar Pendapat antara Timwas TKI DPR RI dengan Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja (Ditjen Binapenta) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Kamis (6/03) lalu, Wakil Ketua Timwas TKI Poempida Hidayatullah mengatakan, Timwas TKI meminta Ditjen Binapenta untuk mengemukakan daftar Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang terkena sanksi skorsing.

Sebagaimana hasil RDP itu, Dirjen Binapenta telah memberikan sanksi administratif berupa skorsing kepada 231 PPTKIS karena melakukan pelanggaran terhadap Pasal 32, Pasal 55, dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

di Luar Negeri.

Sedangkan, sebanyak 160 PPTKIS telah ditindaklanjuti dengan pencabutan skorsing karena telah bersedia memenuhi kewajiban dan ketentuan untuk memperbaiki mekanisme penempatan dan perlindungan TKI sesuai ketentuan UU Nomor 39 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sanksi Administratif Dalam Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Pasal 9 ayat (2) yang dituangkan dalam pernyataan dengan menandatangani pakta integritas (Kontrak Kinerja).

Sedangkan bagi PPTKIS yang tidak memenuhi kewajibannya dan tidak melaporkan hasil perbaikan diusulkan



Wakil Ketua Timwas TKI Poempida Hidayatullah

untuk dilakukan Pencabutan SIPPTKI sesuai Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (4) Permenakertrans Nomor 17 Tahun 2012.

Berikut adalah daftar PPTKIS yang mendapat skorsing, maupun yang skorsingnya telah dicabut:

DAFTAR PPTKIS YANG DIKENAKAN SANKSI ADMINISTRATIF SKORSING

No.	PPTKIS	Pelanggaran UU 39/2004					
		Pasal 32		Pasal 55		Pasal 82	
		S	P	S	P	S	P
1	PT ABDI BELA PERSADA	✓	✓			✓	
2	PT ABUL PRATAMAJAYA					✓	✓
3	PT ABUNI'MAH SEJAHTERA UTAMA					✓	✓
4	PT ADIMITRA SELARAS INTERNASIONAL	✓	✓				
5	PT AGESA ASA JAYA					✓	✓
6	PT AGROSIN MARUMI	✓	✓				
7	PT AKKA AL-MATAR					✓	
8	PT AL HASAN MAJU LESTARI	✓	✓				
9	PT AL HIJAZ INDOJAYA					✓	✓
10	PT AL HUSEIN PUTRA MANDIRI	✓					
11	PT AL JAIDI IKHWAN	✓	✓			✓	✓
12	PT AL KINANAH YAHIA TRADING					✓	✓
13	PT AL MANAR TIARA ABADI					✓	✓
14	PT AL ZUBARA MANPOWER INDONESIA			✓	✓		
15	PT ADILA PREZKIFARINDO DUTA			✓	✓		

No.	PPTKIS	Pelanggaran UU 39/2004					
		Pasal 32		Pasal 55		Pasal 82	
		S	P	S	P	S	P
16	PT ALFA NUSANTARA PERDANA	✓	✓				
17	PT ALFATH NUUR NISA					✓	✓
18	PT ALFINDO MAS BUANA			✓		✓	✓
19	PT ALFIRA PERDANA JAYA	✓	✓				
20	PT ALHGONIY AFLAH ABADI	✓	✓			✓	✓
21	PT ALHIKMAH JAYA BHAKTI	✓	✓				
22	PT AMAL ICHWAN ARINDO	✓	✓				
23	PT AMANAH PUTRA PRATAMA	✓	✓				
24	PT AMANITAMA BERKAH SEJATI					✓	✓
25	PT AMRI MARGATAMA	✓	✓			✓	
26	PT ANDALAN MITRA PRESTASI					✓	✓
27	PT ANDIKA SUMBER REJEKI					✓	✓
28	PT ANNUR JAYA	✓					
29	PT ANTAR INDOSADYA	✓	✓			✓	✓
30	PT ANTAR TENAGA MANDIRI	✓	✓				

**DAFTAR PPTKIS YANG DIKENAKAN SANKSI ADMINISTRATIF SKORSING**

No.	PPTKIS	Pelanggaran UU 39/2004					
		Pasal 32		Pasal 55		Pasal 82	
		S	P	S	P	S	P
31	PT AQBAL PUTRA MANDIRI					✓	✓
32	PT ARAFAH BINTANG PERKASA	✓	✓				
33	PT ARAFAH DUTA JASA					✓	
34	PT ARUNDA BAYU					✓	✓
35	PT ARYA DUTA BERSAMA					✓	
36	PT ASIA PRIMADONA PRATAMA	✓	✓				
37	PT ASIA SKILLED RESOURCES	✓					
38	PT AULIA DUTA PRATAMA	✓	✓			✓	
39	PT AVIDA AVIADUTA			✓	✓	✓	
40	PT BABA METRO UTAMA	✓	✓			✓	
41	PT BAGOES BERSAUDARA					✓	✓
42	PT BAHANATIMUR MEGAH					✓	✓
43	PT BAHRINDO MAHDI			✓		✓	
44	PT BAJRI PUTRA MANDIRI			✓			
45	PT BAKTHIR IKHWAN					✓	✓
46	PT BALI PARADISE CITRA DEWATA	✓	✓				
47	PT BANU NUSA UTAMA	✓	✓				
48	PT BANYUSEWU SEGARA BERKAH	✓	✓				
49	PT BARKAHAYU SAFARINDO	✓	✓			✓	
50	PT BERKAH GUNA SELARAS			✓	✓	✓	✓
51	PT BHAYANGKARA LABOUR SUPPLIER	✓	✓	✓			
52	PT BIDAR PUTRA SUKSES	✓	✓				
53	PT BIDAR TIMUR					✓	
54	PT BIN HAMMOUD SAFARINDO					✓	
55	PT BINA BAHTERA KARYA MANDIRI	✓	✓				
56	PT BINA MANDIRI MULIA RAHARJA	✓	✓				
57	PT BINHASAN MAJU SEJAHTERA					✓	✓
58	PT BINTANG LIMA BRATA	✓	✓				
59	PT BUANA LINTAS KARYA			✓			
60	PT BUANA RIZQIA DUTA SELARAS					✓	✓
61	PT BUANA SAFIRA ABADI	✓	✓			✓	
62	PT BUDI AGUNG BINATARA	✓					
63	PT BUGHSAN LABRINDO	✓	✓			✓	✓
64	PT BUMENJAYA EKA PUTRA			✓		✓	
65	PT CEMERLANG TUNGGAL INTI KARSA	✓	✓				
66	PT CIPTA KARYA PERDANA	✓	✓	✓			
67	PT CITRA PUTRA INDRAB	✓	✓				
68	PT CRYSTAL BIRU MEULIGO	✓	✓			✓	✓
69	PT DASA GRAHA UTAMA	✓	✓				
70	PT DEFITA BERSAUDARA	✓	✓				
71	PT DEKA PERKASA ADIJAYA	✓	✓				
72	PT DELTA RONA ADIGUNA	✓	✓			✓	✓

No.	PPTKIS	Pelanggaran UU 39/2004					
		Pasal 32		Pasal 55		Pasal 82	
		S	P	S	P	S	P
73	PT DHARMA KARYA RAHARJA					✓	✓
74	PT DIAN BAKTI SETIA					✓	
75	PT DIVA DUTA INDOSA	✓					
76	PT DUMAS LINTAS BENUA					✓	✓
77	PT DUTA AMPEL MULIA	✓	✓			✓	
78	PT DUTA ANANDA SETIA					✓	
79	PT DUTA BANTEN MANDIRI					✓	✓
80	PT DUTA FAJAR BARUTAMA					✓	✓
81	PT DUTA PUTRA BANTEN MANDIRI					✓	✓
82	PT DUTA PUTRA KAHURIPAN	✓	✓			✓	
83	PT DUTA SAPTA PERKASA					✓	
84	PT DUTA WIBAWA MANDA PUTRA					✓	✓
85	PT DUTAKUSUMAROS PERSADHA	✓	✓				
86	PT DWI CITRA PUTRA MANDIRI	✓	✓				
87	PT DWI TUNGGAL JAYA ABADI	✓					
88	PT EKA JASA ALIM PRIMA	✓	✓				
89	PT EKORISTI BERKARYA	✓	✓				
90	PT ELOK JAYA	✓	✓				
91	PT ELSHAFAH ADI WIGUNA MANDIRI					✓	✓
92	PT ERA SUTRA ALAM	✓					
93	PT FAJAR BELLA BINTANG REZKI	✓	✓			✓	
94	PT FAJAR SEMESTA RAYA PERKASA	✓	✓				
95	PT FARHAN AL-SYIFA					✓	
96	PT FAUZI PUTRA HIDAYAT	✓					
97	PT FIM ANUGERAH PERKASA					✓	
98	PT SUKSES DUA BERSAUDARA	✓	✓				
99	PT GAYUNG MULYA IKIF					✓	
100	PT GRAHA INDOHIWANA					✓	✓
101	PT GRAHATAMA INDOKARYA	✓					
102	PT GUNA MANDIRI PARIPURNA	✓	✓				
103	PT HAENA DUTA CEMERLANG			✓			
104	PT HASAMURI ABADI	✓	✓				
105	PT HASRAT INSAN NURANI					✓	
106	PT HASSINDO KARYA NIAGA	✓	✓				
107	PT HIDAYAH INSAN PEKERJA	✓	✓			✓	✓
108	PT HIJRAH AMAL PRATAMA	✓	✓				
109	PT HIKMAH SURYA JAYA	✓	✓				
110	PT HOSANA ADI KREASI					✓	✓
111	PT IFAN MARGATAMA	✓	✓				
112	PT IIN ERA SEJAHTERA	✓	✓				
113	PT INDO DUTA SEMBADA	✓	✓				
114	PT INDONESIA FORMOSA ABADI	✓					



DAFTAR PPTKIS YANG DIKENAKAN SANKSI ADMINISTRATIF SKORSING

No.	PPTKIS	Pelanggaran UU 39/2004					
		Pasal 32		Pasal 55		Pasal 82	
		S	P	S	P	S	P
115	PT INDOTAK JAYA ABADI	✓	✓				
116	PT INSANI BHAKTI GEMILANG					✓	
117	PT INTERSOLUSI INDONESIA	✓	✓				
118	PT INTI JAFFARINDO	✓	✓				
119	PT JAJA INDO CORPORA			✓	✓		
120	PT JASEBU PRIMA INTERNUSA	✓	✓			✓	✓
121	PT JAUHARA PERDANA SATU	✓	✓				
122	PT KARYA SEMESTA SEJAHTERA	✓	✓				
123	PT KARYA BAHRINDO CIPTA	✓	✓			✓	
124	PT KARYA BHAKTI ADIL	✓					
125	PT KARYANANDA ADI PERTIWI	✓	✓				
126	PT KEMUNING BUNGA SEJATI			✓		✓	
127	PT KHIDMAT EL KASAB	✓	✓				
128	PT KURNIA SUMBER DUTA SEJAHTERA	✓	✓				
129	PT KUSUMA BAHARI JAYA	✓	✓				
130	PT LAATANSALINTAS INTERNASIONAL	✓	✓				
131	PT LAWU AGUNG RINJANI PERMAI	✓				✓	
132	PT LINTAS BENUA BERKAT ABADI	✓	✓				
133	PT LUCKY MITRA ABADI	✓	✓				
134	PT MADASO INTERNATIONAL LABOUR			✓			
135	PT MAHA BAROKAH RIZKI	✓	✓			✓	
136	PT MAHARANI ANUGERAH PEKERTI	✓	✓				
137	PT MAHKOTA ULFAH SEJAHTERA	✓				✓	
138	PT MARCORIA PUTRA					✓	✓
139	PT MARINAIO PRIMA SUKSES	✓	✓				
140	PT MARSAPAR INTISAR			✓		✓	✓
141	PT MEGA KRIYA MANDIRI	✓	✓				
142	PT MEGAH BUANA CITRA MASINDO					✓	
143	PT MEGAH UTAMA KRIYA NUGRAHA	✓	✓				
144	PT MEKARJAYA WANAYASA PUTRA	✓	✓				
145	PT MERDEKA SEJAHTERA BAHARI	✓					
146	PT MILLENIUM MUDA MANDIRI	✓	✓				
147	PT MIP RESINDO JAYA	✓	✓				
148	PT MOTAROHAB PUTRA PERKASA	✓	✓				
149	PT MUHASATAMA PERDANA					✓	
150	PT MUHDI SETIA ABADI	✓	✓				
151	PT MULTI SUKSES PUTRANTO	✓	✓				
152	PT MUSAFIR KELANA	✓	✓				
153	PT MUTIARA BAHARI ALAMRIA	✓	✓			✓	✓
154	PT NAUFAL AMRI DUTA	✓					
155	PT NUR ALFALAH					✓	
156	PT NUR BHAKTI LANGGENG MANDIRI					✓	✓

No.	PPTKIS	Pelanggaran UU 39/2004					
		Pasal 32		Pasal 55		Pasal 82	
		S	P	S	P	S	P
157	PT NUR FAUZAN SEJAHTERA	✓	✓				
158	PT NURAFI ILMAN JAYA	✓	✓				
159	PT PANCA ASHMA TUNGGAL	✓	✓				
160	PT PANCA BANYU AJI SAKTI					✓	✓
161	PT PANCARAN BATUSARI					✓	✓
162	PT PELITA KARYA JUHARI	✓	✓				
163	PT PERWITA NUSARAYA					✓	✓
164	PT PINANGSIAM KARYA UTAMA	✓	✓				
165	PT PRATAMA LAHJI MANDIRI					✓	✓
166	PT PRIMA DUTA PERSADA			✓	✓		
167	PT PRIMA SYIFA NUSANTARA					✓	
168	PT PUNDI PUTRA INDOTAMA	✓					
169	PT PUTRA ARGAM MANDIRI	✓	✓				
170	PT PUTRA PERTIWI JAYALESTARI			✓	✓		
171	PT PUTRA TIMUR MANDIRI			✓	✓	✓	✓
172	PT PUTRI MANDIRI ABADI					✓	✓
173	PT PUTRI NIL SEJATI	✓	✓				
174	PT PUTRI SAMAWA MANDIRI			✓			
175	PT QAFKO	✓	✓			✓	✓
176	PT QUANTUM JOB	✓	✓				
177	PT RAHMAT JASA SAFIRA			✓	✓	✓	✓
178	PT RAJASA INTAMA					✓	✓
179	PT RAMAH INDAH INDOHASTA					✓	✓
180	PT RAYANA MANGGAHINA					✓	✓
181	PT REKAWAHANA MULYA					✓	
182	PT RESTU BUNDA SEJATI					✓	✓
183	PT RIZKA BERKAH GUNA					✓	
184	PT SABIKA ARABINDO	✓	✓				
185	PT SABRINA PRAMITHA					✓	✓
186	PT SAFINA DAHA JAYA	✓					
187	PT SAFIR AMAL SEJATI	✓					
188	PT SAHABAT PUTRA PENDAWA	✓	✓				
189	PT SAHARA FAJARRINDO CORP	✓	✓				
190	PT SAKINAH PYRAMIDA	✓	✓				
191	PT SALMAN PUTRA RAYANA	✓	✓			✓	✓
192	PT SAMPEANG AUFID MANDIRI	✓	✓				
193	PT SAMUDERA INDONESIA SHIP MANAGEMENT	✓	✓				
194	PT SANG SURYA SENTOSA ABADI	✓	✓				
195	PT SANJAYA PUTRA PERKASA	✓	✓				
196	PT SAPTA REZEKI					✓	✓
197	PT SAPTA SAGUNA	✓	✓				
198	PT SARI WARTI AGUNG	✓	✓				

DAFTAR PPTKIS YANG DIKENAKAN SANKSI ADMINISTRATIF SKORSING

No.	PPTKIS	Pelanggaran UU 39/2004					
		Pasal 32		Pasal 55		Pasal 82	
		S	P	S	P	S	P
199	PT SATRIA ABDI PERSADA	✓	✓				
200	PT SATRIA PARANGTRITIS			✓			
201	PT SENTOSA KARYA MANDIRI	✓	✓				
202	PT SENTOSA PANCA SAKTI	✓					
203	PT SINAR BERUAN MANDIRI					✓	✓
204	PT SOFIA SUKSES SEJATI	✓	✓				
205	PT SRIJATI GANDASARI	✓	✓			✓	
206	PT SUKMA INSAN KAMIL	✓	✓				
207	PT SUMBER BAKAT INSANI	✓	✓				
208	PT SUMBER DHARMA BHAKTI	✓	✓				
209	PT SUMBER MANUSIA RAJIN	✓	✓				
210	PT SUMBER TNG. KERJA REMAJA ABADI	✓	✓				
211	PT TAFICINDO JASATAMA SEGARA	✓	✓				
212	PT TEGAR SUKSES ABADI	✓	✓				
213	PT TEJA MUKTI UTAMA		✓				
214	PT TIMURAYA JAYA LESTARI			✓			
215	PT TRIAS DUTA			✓			

No.	PPTKIS	Pelanggaran UU 39/2004					
		Pasal 32		Pasal 55		Pasal 82	
		S	P	S	P	S	P
216	PT TRIMULTI CITRA BAHARI	✓	✓				
217	PT TRISULA BINTANG MANDIRI					✓	✓
218	PT TRITAMA BINA KARYA					✓	✓
219	PT TRITAMA MEGAH ABADI					✓	✓
220	PT TULUS WIDODO PUTRA	✓	✓				
221	PT USAHATAMA BUNDA SEJATI	✓	✓				
222	PT WAHANA BAROKAH	✓	✓			✓	✓
223	PT WINDU SARANA DEVELOPMENT	✓					
224	PT WIRA KREASI USAHA	✓	✓				
225	PT WIRA MATRA GUNA	✓				✓	
226	PT YASRI	✓	✓			✓	
227	PT YOUNBA BIBA ABADI	✓	✓				
228	PT YOUSEF INDO DAWA	✓	✓				
229	PT ZAM ZAM PERWITA	✓	✓				
230	PT ZAYA ABADI EKASOGI					✓	✓
231	PT ZISRA DWI ABADI	✓	✓				

cat : skorsing dilakukan dalam rangka pembinaan terhadap PPTKIS yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 32, Pasal 55, dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004

ket : *(S: SKORSING/P: PENCABUTAN SKORSING)

** tim terdiri dari unsur Biro Hukum, PTKLN, HKLN Binapenta dan Pengawas Ketenagakerjaan untuk:

1. melakukan verifikasi dan klarifikasi
2. melakukan panggilan kepada PPTKIS untuk memenuhi ketentuan dalam UU 39/2004

(sf)foto:iwan armanias/parle.

Pemilu Berkualitas Jadi Harapan Masyarakat

Ketua DPR RI Marzuki Alie, menandakan, Pemilu 2014 harus benar-benar berkualitas. Masyarakat tentu berharap Pemilu kali ini lebih baik daripada sebelumnya. Untuk itu, penyelenggara Pemilu harus pula menyelenggarakan Pemilu dengan baik, bersih, dan amanah.

Penegasan tersebut disampaikan Marzuki usai mengikuti pertemuan konsultasi para pimpinan lembaga negara, Kamis (20/3) di DPR. Dalam pertemuan konsultasi tersebut, ma-

sing-masing pimpinan lembaga negara menyampaikan pandangannya sesuai kapasitas lembaga yang dipimpinnya. Yang dibicarakan tentu menyangkut isu nasional yang aktual, yaitu seputar Pemilu.

“Semua bicara sesuai dengan pandangannya masing-masing. Saya tadi sampaikan bahwa Pemilu yang demokratis dan berkualitas itu jadi harapan masyarakat dan kita semua. Tentu dengan asas *luber* (langsung, umum, bebas, rahasia) dan juga berja-



Ketua DPR RI Marzuki Alie.

lan dengan aman,” jelas Marzuki. Suara rakyat sangat berharga dan jangan dicerdaya dengan *money politic* atau tekanan apapun kepada masyarakat.

Peserta Pemilu, harap Marzuki, harus mampu memberikan pendidikan

an politik dan pencerahan kepada masyarakat pemilih. Dengan begitu, partisipasi politik meningkat. “Pemilu semakin baik apabila partisipasi masyarakat semakin tinggi. Jangan sampai partisipasi masyarakat di bawah 50% atau paling tidak sama dengan Pemilu beberapa waktu yang lalu. Itulah yang saya sampaikan dalam pertemuan tersebut,” kata Marzuki.

Ditanya soal sengketa Pemilu yang inkrah hanya di tingkat banding sesuai kesimpulan dalam pertemuan tersebut, dia menjelaskan, pimpinan MA telah menyampaikan bahwa sengketa Pemilu terutama menyangkut pidana Pemilu, tidak bisa dikasasi. Ini untuk mempercepat tahapan Pemilu yang sedang berjalan.

Pertemuan tersebut menghasilkan

18 poin kesimpulan yang dibacakan Ketua MPR RI Sidarto Danusubroto. Semuanya menyangkut penyelenggaraan Pemilu 2014. Hadir dalam pertemuan tersebut Presiden, Wakil Presiden, Pimpinan MPR RI, Ketua DPR RI, Pimpinan DPD, Ketua MK, Ketua MA, Ketua KY, dan Ketua BPK. Hadir pula sejumlah menteri mendampingi Presiden. (mh) foto: andri/parle/iw.

Komisi VII Desak PLN Segera Selesaikan PLTU Pangkalan Susu



Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatogana didampingi anggota Komisi VII meninjau pembangunan proyek PLTU Pangkalan Susu.

Di tengah krisis energi listrik yang sudah akut melanda Sumatera Utara, Komisi VII DPR mendesak kepada PLN agar pembangunan proyek PLTU 2x200 MW yang terletak di Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat, Sumatera Utara segera diselesaikan. Proyek tersebut sudah memakan waktu kurang lebih 8 tahun, namun hingga saat ini masih terbengkelai.

Demikian ditegaskan Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatogana pada saat melakukan kunjungan spesifik ke Sumatera Utara yang sekaligus meninjau pembangunan proyek PLTU Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat Sumut, baru-baru ini.

Menurut Sutan, kedatangan Tim Komisi VII bertujuan untuk meninjau sekaligus mensupport PLN untuk menyelesaikan pembangunan proyek ini. Dengan selesainya pembangunan PLTU tersebut, maka kebutuhan energi listrik sebesar 400 MW untuk wilayah Sumatera Utara dapat teratasi.

Ia memahami belum selesainya pembangunan proyek ini lantaran masih terkendala adanya satu tiang tower jaringan

transmisi yang belum bisa dibangun karena masih ada persoalan sosial dengan masyarakat setempat. Masalah ini diharapkan dapat segera teratasi sehingga pembangunan tower sambungan transmisi ini segera dapat terselesaikan.

Sebelum kunjungan ke lokasi, Komisi VII DPR dan PT PLN (Persero) serta disaksikan oleh Gubernur Sumatera Utara telah menandatangani kesepakatan bersama untuk menyelesaikan krisis listrik jangka pendek di Sumatera Utara.

Penandatanganan dilakukan oleh Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatogana, Dirut Operasi Jawa Bali Sumatera PT PLN (Persero) IGN Adnyana dan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujyo Nugroho sebagai Kepala Daerah

Diakuinya, bahwa molornya pembangunan mega proyek ini yang sudah memakan waktu cukup lama serta menelan biaya triliunan rupiah tersebut, dikarenakan ada salah satu kontraktor yang wanprestasi terkait masalah pondasi. “Kalau tidak ada pondasi bagaimana mau dibangun, ibarat membangun sebuah jembatan kalau tiangnya satu saja tidak ada bagaimana bisa terlaksana. Di sisi lain, jika akan mengganti kontraktornya dipastikan juga akan memakan waktu,” tegas Sutan.

Direktur Operasi Jawa Bali Sumatera PT PLN (Persero) IGN Adnyana mengakui bahwa dalam pembangunan Proyek PLTU Pangkalan Susu tersebut masih banyak kendala dan tantangan seperti permasalahan sosial untuk pembangunan SUTT 275 kv. Kendala tersebut yaitu sengketa tanah antar ahli waris, pencurian besi tower oleh orang tak dikenal, dan tidak diijinkan oleh warga untuk mendirikan tower walaupun tanah sudah dibebaskan.

Adnyana menambahkan disamping itu juga ada persoalan terbatasnya genset 150 MW dan 160 MW yang tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena keterbatasan akses transmisi, akses pemasokan BBM dan persyaratan lingkungan serta terbatasnya kesempatan penurunan daya mampu unit pembangkit (spy). foto: supry/parle/hr.

DPR INGATKAN PEMILIH MUDA UNTUK TIDAK GOLPUT



Wakil Ketua DPR RI Sohibul Iman dan jajaran guru SMAN 2 Tasikmalaya.

Wakil Ketua DPR RI Sohibul Iman mengingatkan kepada generasi muda untuk tidak golput dalam pemilihan umum yang akan digelar kurang dari sebulan lagi. Karena setiap warga negara memiliki hak pilih.

“Jangan sekali-kali menjadi golput. Camkan kita harus memilih, karena kita punya hak pilih. Tapi, sebelum memilih, harus tahu *track record* calon legislatif itu. Jangan terbuai oleh janji. Gali informasi sebanyak-banyaknya,” ingat Sohibul saat menerima 450 siswa SMA Negeri 2 Tasikmalaya, di Gedung Nusantara, Rabu (19/03).

Politisi F-PKS ini menilai, kunjungan siswa-siswi ke DPR ini dapat memberikan dampak positif. Dengan mengunjungi DPR, siswa-siswi tersebut mendapatkan informasi tentang DPR langsung dari orang yang berkecimpung langsung di DPR.

“Mereka mendapat informasi langsung dari Anggota DPR, yaitu saya sendiri, terkait informasi-informasi apa yang sesungguhnya terjadi di negeri ini, terutama dari sisi legislatif. Dengan kunjungan ini, mereka memahami realitas politik, bukan hanya dari media massa, tapi langsung dari sumbernya,” tambah Politisi kelahiran Tasikmalaya ini.

Ia juga berharap, program ini dapat terus dijalankan, sehingga generasi muda mendapat bekal positif tentang politik Indonesia sedini mungkin.

“Program ini harus terus dijalankan, tidak boleh berhenti. Karena mengandung nilai positif, walaupun periode berikutnya pimpinan berganti, ini harus terus dilaksanakan. Ini menjadi bekal positif untuk siswa-siswi ini, karena sebagai generasi muda, mereka mendapat informasi sejak dini, maka mereka diharapkan akan lebih baik dari generasi yang

ada saat ini,” harap Sohibul.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala Sekolah SMAN 2 Tasikmalaya Nanang Setiawan menyatakan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk memberi pengalaman tentang DPR kepada siswa-siswinya.

“Rangkaian *study tour* ke DPR ini untuk memperoleh pengalaman, wawasan dan pengetahuan. Pelajaran yang diberikan oleh Wakil Ketua DPR sangat baik, apalagi beliau juga berpesan untuk menghindari golput. Mereka pemilih pemula, ini sangat baik sekali. Diharapkan semua sekolah harus seperti itu,” ujar Nanang.

Ia mengaku, dengan kunjungan ini, pihaknya mendapat pemahaman dan pencerahan tentang DPR. Informasi yang diterima antara media dengan DPR langsung pun menjadi berimbang.

“Jika mendapat informasi dari sebelah pihak, kan informasi yang diterima tidak seimbang, dan seperti ada pihak yang disudutkan. Setelah mendapat informasi langsung dari Wakil Ketua DPR, kami seperti mendapat pencerahan dan terkagum-kagum bagaimana kinerja DPR selama ini,” jelas Nanang.

Ia juga berharap, program ini dapat berjalan secara berkelanjutan. Sehingga, siswa-siswi dapat mengetahui secara langsung bagaimana kinerja DPR selama ini.

Dalam acara, diwarnai dengan tanya jawab, dan diakhiri dengan pemberian cinderamata dari DPR kepada perwakilan sekolah, serta foto bersama di tangga Gedung Nusantara. (sf,mh)/foto:andri/parle/iw.



Tim kunjungan kerja Komisi II DPR berdialog seputar persiapan Pemilu 2014 dengan unsur Muspida dan jajaran Polda Jambi, Senin (10/3). Foto: Husen/Parle.



Tim Kunker Komisi V DPR RI dipimpin Laurens Bahang Dama meninjau Bandara El Tari, Kupang, Rabu (12/3). Foto: Sugeng/Parle.



Tim Kunker Komisi V ke Sulawesi Utara yang dipimpin Muhidin M. Said meninjau jalan alternatif Manado-Tomohon, Senin (10/3).Foto: Rizka/Parle.



Tim Kunker Komisi VIII DPR RI menyerahkan bantuan dari Kemensos di Panti Asuhan Bhakti Luhur Pontianak Kalbar, Senin 10/3 (kiri) dan Panti Sosial Tresna Werdha Jambi Jumat, 7/3 (kanan), foto: Ayu, Sofyan/Parle.